

Strategi Politik Partai Kebangkitan Bangsa dalam Mengakhiri Dominasi PDIP pada Pilbup Kabupaten Blitar Tahun 2020

Willy Aprilito Ahmad Faizal^{1*}, Wisnu²

¹⁻² Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Surabaya

*Corresponding Email: ¹willyaprilito.22033@mhs.unesa.ac.id, ²wisnu@unesa.ac.id

Abstrak: Penelitian ini menganalisis strategi politik Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam mengakhiri dominasi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pada Pemilihan Bupati Kabupaten Blitar Tahun 2020. Penelitian menggunakan metode sejarah dengan pendekatan kualitatif melalui penelusuran sumber tertulis, dokumen resmi, berita, dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemenangan PKB melalui pasangan Rini Syarifah-Rahmat Santoso diperoleh melalui strategi penentuan kandidat, pembentukan koalisi dengan PAN dan PKS, konsolidasi internal, mobilisasi jaringan organisasi dan sosial-keagamaan, serta adaptasi kampanye selama pandemi COVID-19. Strategi tersebut berhasil mengubah konfigurasi politik lokal dan mengakhiri dominasi PDIP di Kabupaten Blitar.

Kata kunci: Strategi Politik, PKB, PDIP, Pilbup, Kabupaten Blitar

Abstract: This study analyzes the political strategy of the National Awakening Party (PKB) in ending the dominance of the Indonesian Democratic Party of Struggle (PDIP) in the 2020 Regent Election of Blitar Regency. The research uses a historical method with a qualitative approach through tracing written sources, official documents, news, and interviews. The results show that PKB's victory through the Rini Syarifah-Rahmat Santoso pair was achieved through candidate selection strategies, coalition formation with PAN and PKS, internal consolidation, mobilization of organizational and socio-religious networks, as well as adapting campaigns during the COVID-19 pandemic. These strategies succeeded in changing the local political configuration and ending PDIP's dominance in Blitar Regency.

Keywords: Political Strategy, PKB, PDIP, Regent Election, Blitar Regency

PENDAHULUAN

Pemilihan kepala daerah adalah salah satu alat utama dalam demokrasi lokal. Ini menentukan sirkulasi elite politik melalui pemilihan umum. Dalam sistem demokrasi, pilkada bukan hanya cara untuk berganti kepemimpinan daerah. Ini juga arena persaingan antar partai politik untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat. Maka, keberhasilan sebuah partai politik dalam pemilihan tidak hanya tergantung pada jumlah dukungan yang dimiliki. Ini juga bergantung pada kemampuan partai untuk merancang strategi politik yang efektif dan sesuai dengan karakter sosial politik daerah (Firmanzah, 2012; Schröder, 2004).

Kabupaten Blitar memiliki karakter politik yang unik di Jawa Timur. Selama bertahun-tahun, daerah ini dikenal sebagai basis kuat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Dominasi ini terlihat dari hasil pemilu legislatif dan pemilihan kepala daerah yang selalu dimenangkan oleh PDIP. Kedekatan historis masyarakat Kabupaten Blitar dengan Presiden pertama Republik Indonesia, Ir. Soekarno, yang dimakamkan di Kota Blitar, memperkuat identitas politik tersebut. Ini menjadikan Kabupaten Blitar sering dianggap sebagai kandang banteng (Badan Pusat Statistik Kabupaten Blitar, 2020).

Namun, konfigurasi politik ini berubah dalam Pemilihan Bupati Kabupaten Blitar Tahun 2020. Pasangan Rini Syarifah dan Rahmat Santoso, yang didukung oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), berhasil mengalahkan pasangan petahana Rijanto dan Marhaenis Urip Widodo, yang didukung oleh PDIP dan partai koalisinya. Hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar menunjukkan bahwa pasangan Rini Syarifah-Rahmat Santoso meraih suara mayoritas dan secara resmi dinyatakan sebagai pemenang Pilbup Kabupaten Blitar Tahun 2020 (KPU Kabupaten Blitar, 2020).

Kemenangan ini menarik perhatian publik dan pengamat politik karena mampu menghentikan dominasi PDIP yang sudah lama berkuasa. Menurut analisis dari pengamat

politik Universitas Brawijaya, kemenangan pasangan Rini Syarifah-Rahmat Santoso menunjukkan bahwa dominasi politik historis tidak selalu menjamin kemenangan petahana. Kelemahan petahana dalam beradaptasi dengan perubahan preferensi pemilih dan keberhasilan pasangan penantang dalam membangun strategi politik yang lebih baik menjadi faktor penting dalam perubahan politik lokal (Rindy, 2020).

Dari sudut pandang strategi politik, kemenangan ini menunjukkan bahwa hasil pemilihan bergantung pada proses perencanaan politik yang baik. Strategi politik berkaitan tidak hanya dengan program kampanye. Ini juga meliputi rekrutmen kandidat, pembentukan koalisi, konsolidasi organisasi partai, pengelolaan modal politik, serta kemampuan membaca peluang politik yang ada (Schröder, 2004; Firmanzah, 2012). Oleh karena itu, kemenangan PKB di Kabupaten Blitar tidak bisa dilihat hanya sebagai keberhasilan figur kandidat. Ini juga sebagai keberhasilan organisasi partai dalam mengelola sumber daya politik yang ada.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas strategi pemenangan dalam pemilihan kepala daerah. Penelitian Sugiarto et al. (2014) menunjukkan bahwa kemenangan pasangan Husein-Budhi di Pilkada Banyumas ditentukan oleh konsolidasi internal partai, segmentasi pemilih, positioning politik, dan pembentukan citra kandidat. Sementara itu, penelitian Widyarini (2022) lebih fokus pada praktik politik perantara dan hubungan patron-klien dalam Pilkada Kabupaten Blitar Tahun 2020. Kedua penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami dinamika politik lokal, tetapi belum menjelaskan secara mendalam bagaimana strategi politik partai dirancang dan diterapkan untuk mengakhiri dominasi partai yang sudah lama berkuasa.

Oleh karena itu, penelitian ini ingin mengisi kekosongan kajian tentang strategi politik partai dengan menjadikan PKB sebagai fokus utama analisis. Penelitian ini tidak hanya membahas kemenangan pasangan Rini Syarifah-Rahmat Santoso sebagai keberhasilan kandidat. Ini juga merekonstruksi strategi kelembagaan PKB. Ini mencakup rekrutmen kandidat, pembentukan koalisi, konsolidasi organisasi, pemanfaatan jaringan Nahdlatul Ulama, dan penyesuaian strategi kampanye selama pandemi COVID-19. Dengan metode sejarah, penelitian ini menawarkan perspektif baru dalam menjelaskan perubahan konfigurasi politik lokal di Kabupaten Blitar dan memperkaya pemahaman tentang strategi politik partai dalam demokrasi lokal di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode sejarah dengan pendekatan kualitatif untuk merekonstruksi strategi politik Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam mengakhiri dominasi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pada Pemilihan Bupati Kabupaten Blitar Tahun 2020. Metode sejarah adalah prosedur ilmiah untuk merekonstruksi peristiwa masa lalu melalui empat tahapan: heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi (Herliana, 2020). Tahapan tersebut digunakan secara sistematis untuk memperoleh fakta sejarah yang autentik, sehingga mampu menjelaskan dinamika politik secara objektif.

Tahap heuristik dilakukan dengan mengumpulkan berbagai sumber primer dan sekunder yang berkaitan dengan Pilkada Kabupaten Blitar Tahun 2020. Sumber primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pengurus DPC PKB Kabupaten Blitar, tim pemenangan Rini Syarifah-Rahmat Santoso, serta tokoh masyarakat yang terlibat dalam proses politik. Selain itu, penelitian memanfaatkan dokumen resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar, hasil rekapitulasi suara, arsip partai politik, dokumentasi kampanye, serta pemberitaan media massa. Sumber sekunder diperoleh melalui buku, artikel jurnal, skripsi, tesis, disertasi, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan strategi politik dan demokrasi lokal.

Kritik sumber dilaksanakan melalui kritik eksternal dan kritik internal. Kritik eksternal bertujuan untuk menguji autentisitas sumber berdasarkan asal-usul, waktu penerbitan, penulis, dan lembaga penerbit. Selanjutnya, kritik internal dilakukan untuk menilai kredibilitas isi sumber melalui proses perbandingan antar hasil wawancara, dokumen resmi, arsip, dan literatur ilmiah. Dengan cara ini, diperoleh fakta sejarah yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan (Herlina, 2020; Wisnu et al., 2017).

Tahap interpretasi dilakukan dengan menghubungkan fakta-fakta yang telah diverifikasi untuk menjelaskan hubungan antara strategi politik PKB dengan keberhasilan pasangan Rini Syarifah-Rahmat Santoso dalam Pilbup Kabupaten Blitar Tahun 2020. Analisis berfokus pada proses rekrutmen kandidat, pembentukan koalisi politik, konsolidasi organisasi, mobilisasi jaringan Nahdlatul Ulama, serta penyesuaian strategi kampanye selama pandemi COVID-19.

Tahap terakhir adalah historiografi, yaitu penyusunan hasil penelitian dalam bentuk narasi sejarah yang sistematis, kronologis, dan analitis. Melalui tahapan tersebut, penelitian ini menghasilkan rekonstruksi mengenai strategi politik PKB dalam mengakhiri dominasi PDIP di Kabupaten Blitar berdasarkan fakta-fakta yang telah diverifikasi, sehingga memiliki validitas akademik (Herlina, 2020; Wisnu et al., 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dominasi Politik PDIP di Kabupaten Blitar Menjelang Pilbup 2020

Kabupaten Blitar merupakan salah satu daerah di Provinsi Jawa Timur yang memiliki karakteristik politik yang cukup khas, ditandai dengan kuatnya cengkeraman Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dalam berbagai kontestasi politik lokal. Kuatnya posisi PDIP di wilayah ini tidak semata-mata terbentuk melalui rangkaian kemenangan partai dalam pemilihan legislatif maupun pemilihan kepala daerah secara berulang, melainkan juga dipengaruhi oleh dimensi historis dan kultural yang telah lama melekat dalam kehidupan masyarakat setempat. Sebagai wilayah yang memiliki ikatan historis mendalam dengan sosok Ir. Soekarno selaku Presiden pertama Republik Indonesia, Kabupaten Blitar pada akhirnya bertransformasi menjadi salah satu basis ideologis nasionalisme yang secara historis maupun simbolis identik dengan PDIP. Kondisi tersebut menjadikan Kabupaten Blitar kerap dijuluki sebagai "kandang banteng", sebuah istilah yang merepresentasikan solidnya basis elektoral PDIP di daerah tersebut (Widyarini, 2022; KPU Kabupaten Blitar, 2020).

Tabel 1. Jumlah Perolehan Kursi DPRD Kabupaten Blitar

Partai Politik	Jumlah Kursi dalam Periode		
	2009-2014	2014-2019	2019-2024
 PKB	8	▲9	—9
 Gerindra	1	▲6	—6
 PDI-P	15	▼13	▲19
 Golkar	5	▼4	▼3
 NasDem		3	▼2
 PKS	2	▲3	▼1
 PPP	2	▼1	—1
 PAN	5	▲7	—7
 Hanura	1	▼0	—0
 Demokrat	9	▼4	▼2
 Patriot	2		

Jumlah Anggota	50	—50	—50
Jumlah Partai	10	▼9	—9

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Blitar, diolah dari KPU Kabupaten Blitar.

Kuatnya posisi PDIP menjelang Pilbup 2020 dapat dilihat dari perolehan suara pada Pemilihan Legislatif 2019. Sebagaimana disajikan pada Tabel 1, PDIP secara berturut-turut selama tiga periode berhasil menempati posisi sebagai partai peraih kursi terbanyak di DPRD Kabupaten Blitar. Khusus pada periode 2019-2024, PDIP mampu meraih 19 kursi dari total 50 kursi yang tersedia, atau setara dengan 38% dari keseluruhan kursi DPRD. Pencapaian ini mengindikasikan bahwa representasi politik PDIP jauh melampaui partai-partai lain sehingga menjadi salah satu sumber daya politik yang krusial dalam menghadapi kontestasi Pilbup Kabupaten Blitar Tahun 2020. Hal tersebut sekaligus menegaskan kedudukan PDIP sebagai kekuatan politik utama yang memiliki jaringan organisasi cukup mapan di berbagai kecamatan, sehingga turut memperkokoh posisi pasangan petahana Rijanto-Marhaenis Urip Widodo yang mendapat dukungan penuh dari PDIP beserta partai-partai koalisinya.

Selain bertumpu pada kekuatan kelembagaan partai, superioritas PDIP juga tampak dari hasil Pilbup Kabupaten Blitar 2015, di mana pasangan Rijanto-Marhaenis yang diusung PDIP berhasil memenangkan kontestasi dan mengantarkan Rijanto menduduki jabatan Bupati Kabupaten Blitar untuk periode 2016-2021. Kemenangan tersebut semakin mengukuhkan kedudukan PDIP sebagai partai penguasa, baik pada ranah eksekutif maupun legislatif, sehingga pada Pilbup 2020 partai ini memasuki kontestasi dengan modal politik yang jauh lebih besar dibandingkan partai-partai pesaingnya. Dalam kajian politik elektoral, fenomena semacam ini lazim disebut sebagai *incumbency advantage*, yakni keuntungan struktural yang dimiliki petahana akibat rekam jejak pemerintahan, akses terhadap jaringan birokrasi, serta tingkat popularitas yang lebih tinggi dibandingkan kandidat baru (Schröder, 2004). Perlu ditegaskan bahwa dominasi suatu partai politik di suatu daerah tidak semata-mata ditentukan oleh besaran perolehan suara, melainkan juga oleh tingkat institusionalisasi organisasi, kapasitas dalam membangun loyalitas pemilih, serta eksistensi jaringan politik yang telah mengakar hingga level bawah. Karakteristik tersebut tercermin pada PDIP di Kabupaten Blitar yang telah berhasil membangun struktur organisasi hingga ke tingkat akar rumput (Panebianco, 1988).

Kondisi ini mendorong berbagai kalangan untuk memprediksi bahwa Pilbup Kabupaten Blitar Tahun 2020 akan kembali dimenangkan oleh pasangan calon yang diusung PDIP. Bahkan, menjelang penetapan pasangan calon, sorotan publik lebih banyak diarahkan pada figur yang berpotensi menjadi penantang petahana, alih-alih pada peluang kekalahan petahana itu sendiri. Sejalan dengan hal tersebut, kajian yang dilakukan oleh pengamat politik dari Universitas Brawijaya menegaskan bahwa PDIP masih merupakan partai dengan dominasi politik terkuat di Kabupaten Blitar, sementara partai-partai lain dinilai belum memiliki kader yang cukup mumpuni untuk menandingi kekuatan petahana (Rindy, 2020). Dalam pandangan tersebut, PKB diposisikan sebagai satu-satunya partai yang berpotensi kompetitif, dengan syarat mampu membangun koalisi yang solid sekaligus mengonsolidasikan basis massa Nahdlatul Ulama (NU).

Meskipun mendominasi secara electoral, PDIP tidak serta-merta merepresentasikan absennya dinamika politik di tingkat masyarakat. Menjelang pelaksanaan Pilbup 2020, mulai bermunculan berbagai kelompok masyarakat yang menginginkan hadirnya alternatif kepemimpinan baru. Salah satu bentuk konkret dari dinamika tersebut tercermin dari munculnya gerakan “Asal Bukan *Incumbent*”, yang merepresentasikan ekspresi kolektif masyarakat atas hasrat perubahan politik di Kabupaten Blitar (Informan A, wawancara, 2026). Fenomena ini mengindikasikan adanya pergeseran orientasi pemilih, dari yang semula

sepenuhnya berbasis identitas kepartaian menuju pertimbangan yang lebih rasional berdasarkan evaluasi kinerja pemerintahan petahana.

Proses seleksi kandidat merupakan salah satu keputusan strategis dalam tubuh partai politik karena berimplikasi langsung terhadap kapasitas partai dalam memperluas basis dukungan elektoral (Hazan dan Rahat, 2010). Dalam konteks ini, keputusan DPP PKB untuk mengusung Rini Syarifah berpasangan dengan Rahmat Santoso dapat dimaknai sebagai upaya partai dalam mengintegrasikan modal sosial-keagamaan dengan modal politik guna memperluas jangkauan dukungan pemilih. Kehadiran Rini Syarifah yang memiliki kedekatan kultural dengan kalangan Nahdlatul Ulama, dipadukan dengan latar belakang Rahmat Santoso sebagai representasi kalangan profesional, menghadirkan konfigurasi politik yang secara signifikan berbeda dari pasangan petahana. Dari perspektif teori organisasi partai, keputusan tersebut merupakan bagian dari strategi institusional PKB dalam memperluas basis dukungan melalui perpaduan modal sosial, modal keagamaan, dan modal politik yang bersifat saling melengkapi.

Berbeda dengan penelitian Widyarini (2022) yang lebih menitikberatkan pada praktik *brokerage politics* dalam konteks Pilbup Kabupaten Blitar 2020, penelitian ini memposisikan dominasi PDIP sebagai latar historis yang turut membentuk arah strategi politik PKB. Dengan demikian, fokus kajian dalam penelitian ini diarahkan pada bagaimana PKB merumuskan strategi guna menantang sekaligus mengakhiri dominasi tersebut. Meskipun PDIP memasuki kontestasi Pilbup 2020 sebagai partai dominan dengan dukungan kelembagaan yang kuat serta keuntungan sebagai petahana, munculnya dinamika sosial-politik di tingkat masyarakat turut membuka ruang kompetisi yang lebih terbuka. Situasi tersebut kemudian dimanfaatkan secara strategis oleh PKB melalui penyusunan langkah politik yang sistematis, mulai dari proses rekrutmen kandidat, pembentukan koalisi, hingga konsolidasi organisasi partai. Ketiga aspek tersebut akan diuraikan lebih lanjut pada bagian selanjutnya.

Strategi Internal PKB dalam Menentukan Kandidat

Salah satu strategi politik yang menjadi faktor penting dalam kemenangan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada Pilbup Kabupaten Blitar Tahun 2020 adalah proses penentuan kandidat. Bagi partai politik, pemilihan calon kepala daerah merupakan keputusan strategis karena akan menentukan arah kompetisi politik sekaligus memengaruhi kemampuan partai dalam memperoleh dukungan elektoral. Hazan dan Rahat (2010) menjelaskan bahwa proses seleksi kandidat merupakan inti dari organisasi partai karena menentukan siapa yang akan menjadi representasi partai dalam kontestasi politik. Oleh karena itu, keberhasilan partai dalam memilih kandidat yang sesuai dengan karakteristik pemilih menjadi salah satu indikator penting dalam memenangkan pemilihan.

Bagan 1. Mekanisme Penjaringan Calon Kepala Daerah



Sumber: Peraturan PKB Nomor 2 Tahun 2019, diolah penulis

Proses penjaringan calon bupati di internal PKB Kabupaten Blitar dimulai melalui mekanisme pendaftaran yang dibuka oleh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PKB Kabupaten Blitar. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa nama yang mengikuti proses penjaringan, di antaranya Abdul Munib yang merupakan Ketua DPC PKB Kabupaten Blitar serta Rini Syarifah yang menjabat sebagai Ketua Muslimat Nahdlatul Ulama Kabupaten Blitar. Pada tingkat DPC, Abdul Munib memperoleh dukungan yang lebih besar dari struktur

partai karena dinilai memiliki pengalaman organisasi dan kedekatan dengan kader PKB di tingkat akar rumput. Namun demikian, mekanisme rekrutmen calon kepala daerah di PKB tidak berhenti pada tingkat cabang, melainkan melalui tahapan di Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) hingga keputusan akhir berada di Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB.

Keputusan DPP PKB yang memberikan rekomendasi kepada Rini Syarifah menunjukkan bahwa proses seleksi kandidat dalam PKB bersifat terpusat (*centralized candidate selection*). Model seleksi yang terpusat memberikan kewenangan kepada elite partai di tingkat pusat untuk menentukan kandidat berdasarkan pertimbangan elektoral, bukan semata-mata berdasarkan dukungan organisasi di tingkat lokal (Hazan dan Rahat, 2010). Dalam Pilbup Kabupaten Blitar, DPP PKB mempertimbangkan bahwa Rini Syarifah memiliki modal sosial yang lebih besar melalui kedekatannya dengan jaringan Nahdlatul Ulama (NU), khususnya Muslimat NU, yang memiliki basis massa luas di Kabupaten Blitar. Pertimbangan tersebut menjadi dasar utama dalam penetapan Rini Syarifah sebagai calon bupati yang diusung PKB.

Selain mempertimbangkan aspek elektabilitas, PKB juga menerapkan strategi komplementer dalam menentukan pasangan calon. Rini Syarifah kemudian dipasangkan dengan Rahmat Santoso yang memiliki latar belakang sebagai advokat dan figur profesional. Kombinasi tersebut menunjukkan upaya PKB untuk menggabungkan modal sosial-keagamaan yang dimiliki Rini Syarifah dengan kapasitas politik dan jejaring profesional yang dimiliki Rahmat Santoso. Strategi ini sejalan dengan pandangan Panebianco (1988) yang menyatakan bahwa partai politik perlu menyesuaikan proses rekrutmen elite dengan kebutuhan organisasi dan dinamika lingkungan politik agar mampu meningkatkan daya saing elektoral.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan PKB tidak hanya ditentukan oleh figur kandidat yang diusung, tetapi juga oleh kemampuan partai dalam mengelola dinamika internal selama proses seleksi calon. Meskipun keputusan DPP berbeda dengan aspirasi sebagian kader di tingkat cabang, konsolidasi organisasi setelah keluarnya rekomendasi mampu menjaga soliditas internal partai. Seluruh struktur PKB di Kabupaten Blitar akhirnya bergerak secara terkoordinasi untuk memenangkan pasangan Rini Syarifah–Rahmat Santoso. Dengan demikian, proses penentuan kandidat tidak hanya menjadi mekanisme administratif dalam rekrutmen politik, tetapi juga merupakan bagian dari strategi kelembagaan PKB untuk menghadirkan kandidat yang memiliki peluang elektoral lebih besar dalam menghadapi dominasi PDIP pada Pilbup Kabupaten Blitar Tahun 2020.

Strategi Koalisi PKB-PAN-PKS dalam Menghadapi Petahana

Selain melalui proses seleksi kandidat, strategi kemenangan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam Pilbup Kabupaten Blitar Tahun 2020 juga dilakukan melalui pembentukan koalisi politik. Strategi ini menjadi penting karena PKB harus menghadapi pasangan petahana Rijanto-Marhaenis Urip Widodo yang didukung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) bersama sejumlah partai politik lainnya. Meskipun PKB memperoleh sembilan kursi DPRD Kabupaten Blitar hasil Pemilu 2019, jumlah tersebut belum memenuhi syarat pencalonan pasangan kepala daerah secara mandiri. Oleh karena itu, pembentukan koalisi menjadi kebutuhan strategis untuk memenuhi persyaratan pencalonan sekaligus memperluas basis dukungan elektoral.

PKB kemudian membangun koalisi bersama Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Berdasarkan hasil penelitian, koalisi tersebut tidak hanya dibentuk untuk memenuhi persyaratan administratif pencalonan, tetapi juga menjadi instrumen untuk menggabungkan sumber daya politik yang dimiliki oleh masing-masing partai. PKB memiliki basis massa yang kuat melalui jaringan Nahdlatul Ulama (NU), sementara PAN dan PKS

memiliki jaringan kader serta segmen pemilih yang berbeda. Penggabungan berbagai basis tersebut memungkinkan pasangan Rini Syarifah-Rahmat Santoso membangun dukungan yang lebih luas di luar basis tradisional PKB.

Dalam perspektif teori koalisi politik, pembentukan koalisi merupakan strategi partai untuk menggabungkan sumber daya dan meningkatkan peluang kemenangan dalam kompetisi elektoral. Riker (1962) melalui teori *minimum winning coalition* menjelaskan bahwa aktor politik cenderung membentuk koalisi yang cukup untuk mencapai tujuan kemenangan. Dalam konteks Pilbup Kabupaten Blitar, koalisi PKB, PAN, dan PKS memperlihatkan upaya membangun kekuatan politik yang mampu menandingi koalisi pendukung petahana. Strategi tersebut juga menunjukkan bahwa PKB tidak mengandalkan kekuatan partainya sendiri, tetapi berupaya mengombinasikan kekuatan organisasi, jaringan sosial, dan basis pemilih dari partai-partai koalisi.

Pembentukan koalisi tersebut juga memperlihatkan adanya pembagian peran politik dalam menghadapi dominasi PDIP. PKB berperan sebagai kekuatan utama yang mengusung kandidat dan menggerakkan jaringan strukturalnya, sedangkan PAN dan PKS berkontribusi melalui jaringan kader serta basis pemilih masing-masing. Koalisi ini menjadi semakin penting karena pasangan Rini Syarifah-Rahmat Santoso harus menghadapi keuntungan petahana yang dimiliki Rijanto. Dengan demikian, koalisi berfungsi sebagai mekanisme untuk mengurangi kesenjangan sumber daya politik antara kandidat penantang dan petahana.

Strategi koalisi PKB juga tidak berhenti pada tingkat elite partai, tetapi dilanjutkan melalui konsolidasi antarpartai di tingkat daerah. Kesamaan kepentingan untuk menghadirkan alternatif kepemimpinan baru menjadi faktor yang memperkuat kerja sama antarpartai. Dalam hal ini, koalisi PKB-PAN-PKS dapat dipahami sebagai strategi politik yang bersifat elektoral sekaligus organisatoris. Koalisi tersebut memungkinkan partai-partai yang secara individual memiliki keterbatasan untuk menggabungkan sumber daya politik dalam menghadapi partai dominan.

Dengan demikian, pembentukan koalisi menjadi salah satu strategi penting PKB dalam menghadapi petahana pada Pilbup Kabupaten Blitar Tahun 2020. Keberhasilan koalisi tersebut tidak hanya ditentukan oleh jumlah partai yang terlibat, tetapi juga oleh kemampuan mengintegrasikan basis dukungan, jaringan organisasi, dan sumber daya politik yang dimiliki masing-masing partai. Strategi inilah yang kemudian memperkuat posisi pasangan Rini Syarifah-Rahmat Santoso sebagai penantang yang mampu mengimbangi bahkan mengalahkan pasangan petahana yang didukung oleh PDIP.

Implementasi Strategi Politik

Implementasi strategi menjadi tahap penting karena keberhasilan strategi politik tidak hanya ditentukan oleh ketepatan perencanaan, tetapi juga oleh kemampuan organisasi dalam menjalankan strategi secara konsisten. Dalam Pilbup Kabupaten Blitar Tahun 2020, implementasi strategi PKB dilakukan melalui penggerakan struktur organisasi, pembagian kerja politik, mobilisasi kader dan relawan, komunikasi langsung dengan masyarakat, serta penyesuaian metode kampanye terhadap kondisi pandemi COVID-19 (Muhammad Rifa'i, wawancara, 24 Februari 2026).

Pelaksanaan strategi diawali dengan pengaktifan struktur organisasi PKB sebagai mesin politik pemenangan. Setelah pasangan Rini Syarifah-Rahmat Santoso ditetapkan sebagai kandidat, struktur partai diarahkan untuk bekerja secara terkoordinasi dalam menyosialisasikan pasangan calon kepada masyarakat. Jaringan organisasi yang dimiliki PKB dimanfaatkan untuk menjangkau pemilih dari tingkat kabupaten hingga wilayah yang lebih rendah. Kader dan simpatisan berperan dalam menyampaikan informasi mengenai pasangan calon, membangun komunikasi dengan masyarakat, serta mengidentifikasi berbagai persoalan yang berkembang di tingkat lokal. Dengan demikian, struktur partai tidak hanya berfungsi

sebagai perangkat administratif, tetapi juga menjadi instrumen mobilisasi politik selama masa kampanye.

Implementasi strategi tersebut kemudian diperkuat melalui pembentukan dan penggerakan jaringan relawan. Relawan berperan sebagai perpanjangan tangan pasangan calon dalam menjangkau masyarakat secara lebih fleksibel. Keberadaan relawan memungkinkan kegiatan politik tidak sepenuhnya bergantung pada struktur formal partai. Mereka membantu melakukan sosialisasi, membangun komunikasi interpersonal, serta memperluas jangkauan dukungan kepada kelompok masyarakat yang tidak secara langsung terhubung dengan struktur PKB (Muhammad Rifa'i, wawancara, 24 Februari 2026). Pola ini menunjukkan bahwa strategi pemenangan Rini-Rahmat tidak hanya mengandalkan popularitas kandidat atau kekuatan partai, tetapi juga mengembangkan jaringan politik yang lebih luas dan bersifat horizontal.

Komunikasi politik kepada masyarakat dilakukan melalui pendekatan langsung dan interpersonal. Kader, relawan, serta tokoh masyarakat menjadi aktor penting dalam menyampaikan visi dan misi pasangan calon. Pendekatan tersebut memungkinkan pesan politik disesuaikan dengan karakteristik masyarakat di masing-masing wilayah. Dalam konteks politik lokal, komunikasi interpersonal memiliki arti penting karena hubungan sosial dan tingkat kepercayaan terhadap tokoh sering kali memengaruhi pilihan politik masyarakat. Strategi ini juga memungkinkan tim pemenangan membangun citra Rini-Rahmat sebagai pasangan yang dekat dengan masyarakat dan menawarkan alternatif kepemimpinan baru.

Pandemi COVID-19 menjadi faktor eksternal yang memengaruhi pelaksanaan strategi kampanye. Pembatasan kegiatan masyarakat menyebabkan kampanye terbuka dan mobilisasi massa tidak dapat dilakukan secara bebas. Kondisi tersebut mendorong PKB dan tim pemenangan untuk menyesuaikan metode komunikasi politik dengan memperbanyak pertemuan dalam kelompok kecil, komunikasi melalui jaringan sosial, serta pemanfaatan media digital (Muhammad Rifa'i, wawancara, 24 Februari 2026). Strategi ini menunjukkan kemampuan PKB dalam beradaptasi terhadap perubahan lingkungan politik. Dengan demikian, pandemi tidak hanya dipandang sebagai hambatan, tetapi juga mendorong munculnya pola kampanye yang lebih terbatas, personal, dan berbasis jaringan.

Selain itu, implementasi strategi PKB diarahkan untuk membangun narasi perubahan di tengah dominasi PDIP dan keberadaan petahana. Pesan politik yang dibangun menempatkan Rini-Rahmat sebagai alternatif kepemimpinan bagi masyarakat Kabupaten Blitar. Narasi tersebut menjadi penting karena kompetisi Pilbup 2020 tidak hanya mempertemukan dua pasangan calon, tetapi juga mempertemukan kekuatan politik yang telah lama dominan dengan kekuatan penantang yang menawarkan perubahan. PKB berusaha memanfaatkan dinamika tersebut melalui intensifikasi komunikasi politik dan penguatan hubungan dengan kelompok-kelompok masyarakat.

Dengan demikian, implementasi strategi politik PKB dalam Pilbup Kabupaten Blitar Tahun 2020 merupakan proses penerjemahan keputusan strategis ke dalam tindakan nyata. Pengaktifan mesin partai, penggerakan kader dan relawan, komunikasi interpersonal, pemanfaatan jaringan sosial, serta adaptasi terhadap pandemi menjadi bentuk konkret pelaksanaan strategi di lapangan. Pelaksanaan tersebut kemudian menghasilkan dukungan elektoral yang signifikan bagi pasangan Rini Syarifah-Rahmat Santoso dan menjadi bagian penting dari proses PKB dalam mengakhiri dominasi PDIP di Kabupaten Blitar.

Faktor Keberhasilan PKB dalam Mengakhiri Dominasi PDIP di Kabupaten Blitar

Tabel 2. Rincian perolehan suara Pilbup Blitar Tahun 2020

No	URAIAN	SUARA AKHIR
IV.	RINCIAN PEROLEHAN SUARA	
A.	DATA PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON	
1	DRS. RIJANTO, M.M. MARHAENIS U.W.	255604
2	RINI SYARIFAH H.R. SANTOSO, S.H.	365365
B.	JUMLAH SUARA SAH	620969

Sumber: Dokumen KPU Kabupaten Blitar

Kemenangan pasangan Rini Syarifah-Rahmat Santoso pada Pilbup Kabupaten Blitar Tahun 2020 menjadi titik penting dalam perubahan konfigurasi politik lokal. Pasangan yang diusung Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut berhasil mengalahkan pasangan petahana Rijanto-Marhaenis Urip Widodo yang didukung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) beserta partai-partai koalisinya. Berdasarkan hasil rekapitulasi suara, Rini Syarifah-Rahmat Santoso memperoleh 365.365 suara atau 58,84 persen, sedangkan pasangan petahana memperoleh 255.602 suara atau 41,16 persen (KPU Kabupaten Blitar, 2020). Hasil tersebut menunjukkan bahwa dominasi politik PDIP di Kabupaten Blitar tidak bersifat permanen dan dapat berakhir ketika muncul strategi politik yang mampu mengombinasikan berbagai sumber daya secara efektif.

Faktor pertama yang mendukung keberhasilan PKB adalah kemampuan partai dalam menentukan pasangan kandidat yang memiliki modal politik yang saling melengkapi. Rini Syarifah memiliki kedekatan dengan jaringan Nahdlatul Ulama (NU), khususnya melalui posisinya sebagai Ketua Muslimat NU Kabupaten Blitar. Kedekatan tersebut memberikan modal sosial dan kultural yang penting untuk menjangkau masyarakat berbasis keagamaan. Sementara itu, Rahmat Santoso memiliki latar belakang profesional dan pengalaman politik yang melengkapi karakter pasangan. Kombinasi tersebut memungkinkan PKB membangun pasangan calon dengan segmentasi dukungan yang lebih luas. Dalam perspektif Hazan dan Rahat (2010), proses seleksi kandidat merupakan keputusan strategis partai karena kandidat yang dipilih menjadi representasi organisasi sekaligus instrumen untuk memperluas dukungan elektoral.

Faktor kedua adalah keberhasilan PKB membangun koalisi dengan PAN dan PKS. Koalisi tersebut memperluas basis dukungan sekaligus menggabungkan sumber daya politik dari masing-masing partai. PKB memiliki basis sosial-keagamaan yang kuat, sedangkan PAN dan PKS memiliki jaringan kader serta segmen pemilih yang berbeda. Dalam teori koalisi politik, kerja sama antarpolisi memungkinkan aktor politik menggabungkan sumber daya untuk mencapai tujuan elektoral secara lebih efektif (Riker, 1962). Dengan demikian, koalisi tersebut menjadi instrumen penting untuk mengimbangi kekuatan PDIP yang memiliki jumlah kursi DPRD dan basis organisasi yang lebih besar.

Faktor ketiga adalah kemampuan PKB beradaptasi terhadap kondisi pandemi COVID-19. Pembatasan kegiatan sosial dan politik menyebabkan kampanye konvensional tidak dapat dilakukan secara maksimal. Kondisi ini mendorong tim pemenang untuk memanfaatkan jaringan organisasi, tokoh masyarakat, komunikasi langsung, serta berbagai bentuk kegiatan sosial sebagai sarana membangun kedekatan dengan pemilih. Kemampuan menyesuaikan strategi terhadap perubahan lingkungan politik merupakan unsur penting dalam strategi kemenangan (Schröder, 2004).

Selain itu, kemenangan PKB juga dipengaruhi oleh munculnya keinginan sebagian masyarakat terhadap perubahan kepemimpinan. Keberadaan gerakan “Asal Bukan *Incumbent*” menunjukkan adanya kelompok pemilih yang tidak lagi semata-mata mempertimbangkan identitas partai, tetapi juga mengevaluasi kinerja petahana. Situasi tersebut menciptakan peluang politik bagi PKB untuk memosisikan Rini Syarifah-Rahmat Santoso sebagai alternatif kepemimpinan. Dengan menggabungkan pemilihan kandidat yang strategis, koalisi politik, kemampuan adaptasi, serta pemanfaatan peluang perubahan preferensi pemilih, PKB berhasil mengubah posisinya dari partai penantang menjadi kekuatan politik yang mampu mengakhiri dominasi PDIP di Kabupaten Blitar.

Implikasi Politik dari Kemenangan PKB dalam Pilbup Kabupaten Blitar 2020

Kemenangan pasangan Rini Syarifah–Rahmat Santoso pada Pilbup Kabupaten Blitar Tahun 2020 membawa implikasi penting terhadap konfigurasi politik lokal. Kemenangan tersebut mengakhiri dominasi PDIP yang selama beberapa periode menjadi kekuatan politik utama di Kabupaten Blitar. Berdasarkan hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar, pasangan Rini-Rahmat memperoleh 365.365 suara atau 58,84 persen, sedangkan pasangan Rijanto-Marhaenis Urip Widodo memperoleh 255.694 suara atau 41,16 persen (KPU Kabupaten Blitar, 2020). Hasil tersebut menunjukkan bahwa kekuatan politik yang telah lama mengakar dapat ditantang melalui strategi politik yang terorganisasi.

Implikasi pertama adalah meningkatnya posisi tawar PKB dalam politik lokal Kabupaten Blitar. Kemenangan tersebut membuktikan bahwa PKB tidak hanya mampu menjadi partai pendukung atau kekuatan alternatif, tetapi juga dapat menjadi aktor utama dalam menentukan arah pemerintahan daerah. Keberhasilan ini sekaligus memperkuat legitimasi politik PKB dalam membangun basis kekuasaan di tingkat lokal.

Implikasi kedua adalah munculnya kompetisi politik yang lebih terbuka. Dominasi satu partai tidak lagi menjadi jaminan kemenangan dalam pemilihan kepala daerah. Kemenangan PKB menunjukkan bahwa kombinasi antara figur kandidat, koalisi politik, jaringan organisasi, dan perubahan preferensi pemilih dapat mengubah peta kekuatan politik lokal. Dengan demikian, Pilbup Kabupaten Blitar 2020 menandai pergeseran konfigurasi politik dari dominasi tunggal menuju kompetisi yang lebih dinamis dan terbuka.

SIMPULAN

Kemenangan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) melalui pasangan Rini Syarifah–Rahmat Santoso pada Pilbup Kabupaten Blitar Tahun 2020 menunjukkan adanya perubahan penting dalam konfigurasi politik lokal. Keberhasilan tersebut sekaligus mengakhiri dominasi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang sebelumnya memiliki basis politik kuat dan didukung oleh keunggulan sebagai partai dominan serta keberadaan pasangan petahana. Kemenangan PKB tidak terjadi secara spontan, melainkan merupakan hasil dari strategi politik yang dirancang dan dilaksanakan melalui beberapa tahapan. Strategi tersebut diawali dengan proses penentuan kandidat yang mempertimbangkan modal sosial, jaringan keagamaan, dan peluang elektoral Rini Syarifah. Selanjutnya, PKB membangun koalisi dengan PAN dan PKS untuk memperluas basis dukungan serta menggabungkan sumber daya politik. Strategi tersebut kemudian diimplementasikan melalui konsolidasi organisasi, pengaktifan struktur partai, mobilisasi kader dan relawan, pemanfaatan jaringan sosial-keagamaan, serta komunikasi langsung dengan masyarakat. Kondisi pandemi COVID-19 juga mendorong PKB untuk menyesuaikan metode kampanye dengan menggunakan pendekatan yang lebih terbatas, personal, dan berbasis jaringan. Dengan demikian, kemenangan PKB dalam Pilbup Kabupaten Blitar Tahun 2020 merupakan hasil dari kemampuan partai dalam mengintegrasikan strategi internal, koalisi politik, jaringan sosial,

dan adaptasi terhadap dinamika lingkungan politik. Kemenangan tersebut membuktikan bahwa dominasi politik yang telah mengakar tidak bersifat permanen. Melalui strategi yang terorganisasi dan kemampuan memanfaatkan peluang politik, PKB berhasil mengubah posisinya dari partai penantang menjadi kekuatan politik utama sekaligus mengakhiri dominasi PDIP dalam politik lokal Kabupaten Blitar.

DAFTAR PUSTAKA

Arsip:

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Blitar. (2014). *Statistik daerah Kabupaten Blitar 2014*.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Blitar. (2020). *Statistik daerah Kabupaten Blitar 2020*.
- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar. (2020a). *Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kabupaten Blitar dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar tahun 2020*.
- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar. (2020b). *Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar Nomor 898/PL.02.6-Kpt/3505/KPU-Kab/XII/2020 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020*. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum.
- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar. (2020c). *Kliping pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar tahun 2020*.
- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar. (2021, January 23). *Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar Nomor 1/PL.02.7-Kpt/3505/KPU-Kab/I/2021 tentang penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Blitar terpilih dalam Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020*. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum.
- Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. (2020a). *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau wali kota dan wakil wali kota serentak lanjutan dalam kondisi bencana nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*. Database Peraturan BPK.
- Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. (2020b). *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau wali kota dan wakil wali kota serentak lanjutan dalam kondisi bencana nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*. Database Peraturan BPK.
- Partai Kebangkitan Bangsa. (2019). *Peraturan Partai Kebangkitan Bangsa Nomor 2 Tahun 2019 tentang penjurangan, penetapan, dan pemenangan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota*.
- Republik Indonesia. (2011). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik*. Database Peraturan BPK.
- Republik Indonesia. (2016). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang*. Database Peraturan Perundang-undangan.
- Republik Indonesia. (2017). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum*. Database Peraturan BPK.

Artikel jurnal:

- Gunther, R., & Diamond, L. (2003). Species of political parties: A new typology. *Party Politics*, 9(2), 167–199. <https://olemiss.edu/courses/pol628/guntherdiamond03.pdf>
- Ilmiyah, N. B. (2025). Dari Bu Nyai menjadi bupati: Mundjidah Wahab membangun wajah Jombang 2014–2023. *Avatara: Jurnal Pendidikan Sejarah*, 15(5). <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/avatara/article/view/65074>
- Katz, R. S., & Mair, P. (1995). Changing models of party organization and party democracy: The emergence of the cartel party. *Party Politics*, 1(1), 5–28. <https://doi.org/10.1177/1354068895001001001>
- Mujani, S., & Irvani, D. (2020). Sikap dan perilaku warga terhadap kebijakan penanganan wabah COVID-19. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 11(2), 219–238. <https://doi.org/10.14710/politika.11.2.2020.219-238>
- Nurhadi, & Sunarso. (2018). Peran kiai dalam membangun partisipasi pemilih. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 3(2), 169–175. <https://doi.org/10.17977/um019v3i2p169-175>
- Nurkholek, A., Wardhani, A. C., Trenggono, N., Zainal, A. G., & Putra, P. (2025). Strategi komunikasi politik Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Lampung Barat pada Pemilu 2024. *Jurnal Media Informatika (JUMIN)*, 6(5), 2566–2571. <https://doi.org/10.55338/jumin.v6i5.6836>
- Saleh, A. M. (2016). Tantangan dan solusi dalam peningkatan partisipasi pemilih pada pemilu di Indonesia. *Jurnal Thengkyang*, 1(1). <https://jurnal.unisti.ac.id/thengkyang/article/view/256>
- Sugiarto, B., Pratiwi, O. C., & Akbar, A. A. S. (2014). Strategi kemenangan dalam pemilihan kepala daerah. *Jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, 27(3), 143–151. <https://e-journal.unair.ac.id/MKP/article/download/2471/1790>
- Widyarini, D. A. (2022). Brokerage dalam politik lokal: Karakteristik patron-klien wilayah Abangan pada Pilkada Kabupaten Blitar tahun 2020. *Jurnal Mengkaji Indonesia*, 1(2), 109–134. <https://doi.org/10.59066/jmi.v1i2.133>

Buku:

- Budiardjo, M. (2007). *Dasar-dasar ilmu politik* (Ed. revisi). PT Gramedia Pustaka Utama.
- Dahl, R. A. (1971). *Polyarchy: Participation and opposition*. Yale University Press.
- Duverger, M. (1963). *Political parties: Their organization and activity in the modern state* (2nd ed.). John Wiley & Sons.
- Firmanzah. (2012). *Marketing politik: Antara pemahaman dan realitas* (Ed. ke-3). Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Hazan, R. Y., & Rahat, G. (2010). *Democracy within parties: Candidate selection methods and their political consequences*. Oxford University Press.
- Herlina, N. (2020). *Metode sejarah* (Ed. ke-2). Satya Historika.
- Panebianco, A. (1988). *Political parties: Organization and power*. Cambridge University Press.
- Paul, T. V., Wirtz, J. J., & Fortmann, M. (Eds.). (2004). *Balance of power: Theory and practice in the 21st century*. Stanford University Press.
- Riker, W. H. (1962). *The theory of political coalitions*. Yale University Press.
- Schröder, P. (2004). *Strategi politik* (Ed. terj.). Friedrich Naumann Stiftung.
- Wisnu, & Aji, R. N. B. (2018). *Metode penelitian sejarah*. Unesa University Press.

Wawancara:

- Rifa'i, Muhammad. Sekretaris Umum DPC PKB Kabupaten Blitar. Wawancara, 24 Februari 2026.
- Informan A. Warga Kelurahan Kedungbunder. Wawancara, 2 April 2026.

Internet:

- Ais. (2020). DPP PKB rekom Mak Rini–Santoso pada Pilbup Blitar. *LENTERA.co*.
<https://lentera.co/blog/item/22761/dpp-pkb-rekom-mak-rini-santoso-pada-pilbup-blitar>
- Chusna, A. (2020a). Pilkada Kabupaten Blitar, Rini–Rahmad dinyatakan pemenang, saksi lawan tolak tanda tangan. *ANTARA Jatim*.
<https://jatim.antaranews.com/berita/440392/pilkada-kabupaten-blitar-rini-rahmad-dinyatakan-pemenang-saksi-lawan-tolak-tanda-tangan>
- Chusna, A. (2020b). Tiga bakal calon PKB daerah “sowan” ke kiai NU. *ANTARA*.
<https://www.antaranews.com/berita/1697202/tiga-bakal-calon-pkb-daerah-sowan-ke-kiai-nu>
- Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar. (2015, December 18). Hasil rekapitulasi KPU Kabupaten Blitar menyatakan 78% setuju Rijanto–Marhaenis menjadi Bupati dan Wakil Bupati. *Pemerintah Kabupaten Blitar*.
<https://www.blitarkab.go.id/2015/12/18/hasil-rekapitulasi-kpu-kabupaten-blitar-menyatakan-78-setuju-rijanto-marhaenis-menjadi-bupati-dan-wakil-bupati/>
- Hakim, S. (2020). Hasto: PDIP paling banyak berkoalisi dengan Golkar di Pilkada. *ANTARA*.
<https://www.antaranews.com/berita/1694066/hasto-pdip-paling-banyak-berkoalisi-dengan-golkar-di-pilkada>
- Haryadi, D. (2020, July 29). Ingin majukan perekonomian Blitar, Mak Rini pastikan diri maju di Pilbub 2020. *FaktualNews.co*. <https://faktualnews.co/2020/07/29/ingin-majukan-perekonomian-blitar-mak-rini-pastikan-diri-maju-di-pilbub-2020/226352/>
- Komisi Pemilihan Umum Papua Pegunungan. (2025). Koalisi partai politik: Pilar penting demokrasi di Papua Pegunungan.
https://papuapegunungan.kpu.go.id/blog/read/1104_koalisi-partai-politik-pilar-penting-demokrasi-di-papua-pegunungan
- Rindy, E. (2020). Jago PDIP tumbang di Pilbup Blitar 2020, ini ulasan pengamat politik UB. *detikNews*. <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5290936/jago-pdip-tumbang-di-pilbup-blitar-2020-ini-ulasan-pengamat-politik-ub>
- Sholeh, M. (2019). PDI Perjuangan meraih kursi terbanyak DPRD Kabupaten Blitar. *TIMES Indonesia*. <https://timesindonesia.co.id/politik/221667/pdi-perjuangan-meraih-kursi-terbanyak-dprd-kabupaten-blitar>
- Sholeh, M. (2020). Menang quick count Pilbup Blitar, Mak Rini akan kawal perolehan suara. *TIMES Indonesia*. <https://timesindonesia.co.id/politik/314915/menang-quick-count-pilbup-blitar-2020-mak-rini-akan-kawal-perolehan-suara>
- Susanto, B. (2020). Gandeng PKB, PAN siap menangkan pasangan Mak Rini–Ma Dhene di Pilkada Blitar. *Jatimnet*. <https://jatimnet.com/gandeng-pkb-pan-siap-menangkan-pasangan-mak-rini-ma-dhene-di-pilkada-blitar>
- Wiyono, A. (2023). Profil dan biodata Rini Syarifah: Dua tahun jadi Bupati Blitar, Mak Rini punya harta kekayaan segini. *Mengerti.id*.
<https://www.mengerti.id/sosok/6649783482/profil-dan-biodata-rini-syarifah-dua-tahun-jadi-bupati-blitar-mak-rini-punya-harta-kekayaan-segini>